



# INTEREST

**MAJALAH ILMIAH FE - UNIB**

**VOLUME IX NOMOR 02**

**EDISI JULI-DESEMBER 2006**

- |   |  |
|---|--|
| BAMBANG AGOES. H<br>PASAREMI            | ANALISIS PENDAPATAN PETANI SAYURAN DI DESA SUMBER<br>URIP KECAMATAN SELUPU REJANG  |
| M. ABDUH                                | SATMAX: A PROPOSED MODEL IN ASSESSING CLIENTS'<br>SATISFACTION WITH BUSINESS ASSISTANT SERVICES IN<br>BUSINESS INCUBATOR INDUSTRY                        |
| LISA MARTIAH NP<br>FREBUMI ARI & IPON S | TINGKAT PEMAHAMAN DAN MINAT MAHASISWA TERHADAP<br>EKONOMI SYARIAH  |
| KAMALUDIN<br>ERMALINDA                  | DAMPAK INFORMASI <i>HIGHLIGHT EFFECT</i> TERHADAP HARGA<br>SAHAM   |
| LISMAWATI                               | PELUANG INVESTASI SERTA HUBUNGANNYA DENGAN<br>KEBIJAKAN PENDANAAN, DIVIDEN DAN ARUS KAS  |
| PRANINGRUM<br>MERI NURLAILI             | HUBUNGAN <i>WORK-FAMILY CONFLICT</i> , KOMITMEN<br>ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN<br>PRODUKTIVITAS KARYAWAN DI RUMAH SAKIT RAFFLESIA<br>BENGKULU |
| SUNOTO                                  | ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI BAGI NELAYAN AKIBAT<br>KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  |
| HUTAPIA<br>SISKA                        | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH<br>UANG KUASI DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1998-2005   |
| SYAMSUL BACHRI<br>NASUTION              | KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI, DAN KEINGINAN<br>BERPINDAH DI KALANGAN AKADEMISI  |
| LELA ROSPIDA                            | PENGARUH PENDAPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN<br>JENIS PEKERJAAN TERHADAP PENGGUNA PULSA TELEPON<br>RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kelurahan Beringin Raya)     |

**Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu**

Jalan Raya Kandang Limun Telpon. (0736) 21396 Bengkulu

***KATA PENGANTAR REDAKSI***

**P**uji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita. Hanya dengan kekuasaanNya Interest dapat kembali terbit.

Pada penerbitan volume IX Nomor 01 tahun 2006 ini kami menerbitkan 10 buah tulisan ilmiah. Artikel yang masuk mulai dari masalah jenis pekerjaan, pendapatan, investasi dan masalah makro dan moneter lainnya, kami berharap artikel-artikel tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca.

Usaha sudah kami lakukan untuk dapat terbit tepat waktu, akan tetapi sampai saat ini masih belum terlaksana karena beberapa hal, diantaranya ketepatan artikel yang masuk. Oleh karena itu kami sangat senang jika artikel yang masuk dapat tepat waktu. Selain itu kami berharap senantiasa ada peningkatan kualitas tulisan dari waktu ke waktu.

Dewan Penyunting Majalah Interest

**PENGELOLA/PENGURUS PENERBITAN JURNAL EKONOMI  
FE-UNIB**

SK.Dekan  
Nomor: 1349.A/J.30.1.12/HK/2004

Penasehat  
**Dekan Fakultas Ekonomi**

Penanggung Jawab  
**Pembantu Dekan I**

Ketua Dewan Penyunting  
**Retno Agustina Ekaputri**

Sekretaris  
**Sunoto**

**Editors**

Ridwan Nurazi  
*Universitas Bengkulu*

Ferry Tema Atmaja  
*Universitas Bengkulu*

Zulkifli Husin  
*Universitas Syiah Kuala*

Agus Suman  
*Universitas Brawijaya*

Diah Natalisa  
*Universitas Sriwijaya*

Rachman Lubis  
*Universitas Syiah Kuala*

Achyar Adnan  
*Universitas Islam Indonesia*

Lizar Alfansi  
*Universitas Bengkulu*

Staf Sekretariatan  
*Amaliah*

**Kantor Editor**  
**Majalah Ilmiah INTEREST**  
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu  
Jl. Raya Kandang Limun Bengkulu  
Telp. (0736)21170 Pes (202) Fax. 0376-21396

E-mail : [fe\\_unib03@yahoo.com](mailto:fe_unib03@yahoo.com)**MAJALAH ILMIAH INTEREST****Vol. IX No.02 JULI– DESEMBER 2006****ISSN :1410-8828**

- Analisis Pendapatan Petani Sayuran Di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang  
*Bambang Agoes. H*  
*Pasaremi.....*1-7
- Satmax: A Proposed Model in Assessing Clients' Satisfaction With Business Assistant Services in Business Incubator Industry  
*M. Abdul.....*8-24
- Tingkat Pemahaman dan Minat Mahasiswa Terhadap Ekonomi Syariah  
*Lisa Martiah Nila Puspita*  
*Frebumi Ari dan Ipon Sundari.....*25-30
- Dampak Informasi *Highlight Effect* Terhadap Harga Saham  
*Kamaludin*  
*Ermalinda.....* 31-36
- Peluang Investasi Serta Hubungannya Dengan Kebijakan Pendanaan, Dividen dan Arus Kas  
*Lismawati.....*37-42
- Hubungan *Work-Family Conflict*, komitmen Organisasi Terhadap Motivasi Kerja dan Produktivitas Karyawan Di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu  
*Praningrum*  
*Meri*  
*Nurlaili.....*43-49
- Analisis Kebijakan subsidi Bagi Nelayan Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)  
*Sunoto.....*50-58
- Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Uang Kuasi Di Indonesia Periode Tahun 1998-2005  
*Hutapia*  
*Siska.....*59-69
- Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Dan Keinginan Berpindah

Di Kalangan Akademisi

*Syamsul Bachri*

*Nasution*..... 70-78

Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Terhadap Pengguna  
Pulsa Telepon Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Beringin Raya)

*Lela*

*Rospida*.....79-  
84



# INTEREST

## MAJALAH ILMIAH FE - UNIB

**VOLUME XVI NOMOR 01  
2006**

**EDISI JANUARI-MARET**

**BAMBANG AGOES. H  
PASAREMI**

**ANALISIS PENDAPATAN PETANI SAYURAN DI DESA  
SUMBER URIP KECAMATAN SELUPU REJANG**

**KAMALUDIN  
ERMALINDA**

**DAMPAK INFORMASI *HIGHLIGHT EFFECT* TERHADAP  
HARGA SAHAM**

**LISA MARTIAH NP  
FREBUMI ARI & IPON S**

**TINGKAT PEMAHAMAN DAN MINAT MAHASISWA  
TERHADAP EKONOMI SYARIAH**

**LELA ROSPIDA**

**PENGARUH PENDAPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN  
DAN JENIS PEKERJAAN TERHADAP PENGGUNA PULSA  
TELEPON RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KELURAHAN  
BERINGIN RAYA)**

**PRANINGRUM**

**HUBUNGAN *WORK-FAMILY CONFLICT*, KOMITMEN  
ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN  
PRODUKTIVITAS KARYAWAN DI RUMAH SAKIT  
RAFFLESIA BENGKULU**

**LISMAWATI**

**PELUANG INVESTASI SERTA HUBUNGANNYA DENGAN  
KEBIJAKAN PENDANAAN, DIVIDEN DAN ARUS KAS**

**SUNOTO**

**ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI BAGI NELAYAN AKIBAT  
KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

**BIE INDRASWANTI  
ERIKA NURMIATI**

**ANALISIS NILAI TUKAR RUPIAH/DOLLAR (APLIKASI  
MODEL MONETER) PERIODE 1997-2004**

**SYAMSUL BACHRI  
NASUTION**

**KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI, DAN  
KEINGINAN BERPINDAH DI KALANGAN AKADEMISI**

MAKHMUD IKHSAN

MODEL PEMBELAJARAN MANAJEMEN KEUANGAN  
UNTUK PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA  
PENGEMBANGAN IPTEK

## ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI BAGI NELAYAN AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

SUNOTO<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The aim of this research is to know the best subsidy policy for traditional fisherman in Bengkulu City. The Analysis of this research used Analytical Hierarchy Process (AHP) Method. AHP is one of analysis instrument to take decision on complex problems with way simplify and quicken make decision process. This process involves pairwise comparisons. The decision maker starts by laying out the overall hierarchy of the decision. This hierarchy reveals the factors to be considered as well as the various alternatives in the decision. From the analysis we can conclude that the criteria of subsidy policy which very suitable for traditional fisherman in Bengkulu city in crease income with priority 0,59 then distributor actor which very suitable is village apparatus with priority 0,53 and choice alternative of subsidy policy which very suitable for traditional fisherman in Bengkulu city is a help catch tool for fisherman with priority 0,45. with consistency ratio (CR) is 0,5 – 6,9 %.*

*Key Words: subsidy policy, analytical hierarchy process.*

## 1. PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditi strategis bagi kehidupan masyarakat banyak, baik rumah tangga maupun dunia usaha. Kebutuhan akan BBM ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan diberbagai sektor ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya arus mobilitas baik barang maupun orang. Produksi minyak Indonesia mengalami krisis karena tidak mampu memasok kebutuhan dalam negeri hingga Indonesia harus jadi importir dalam empat tahun terakhir. Produksi minyak kita turun pada kisaran satu juta barrel perhari, sementara kebutuhan mencapai 1,3 juta barrel perhari. Untuk saat ini kelangsungan industri minyak masih sangat dibutuhkan sebab belum ada alternatif pengganti. Kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional telah meningkatkan pos pengeluaran di dalam APBN, yang mengakibatkan defisit anggaran yang besar dan harus dicari jalan untuk menutupinya (Kompas, 25 September 2004).

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. Pemerintah akhirnya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20 - 40 persen pada awal Maret 2005. Alasan pemerintah, harga jual semua jenis BBM di Pertamina tak sepadan dengan biaya pokok produksi yang dikeluarkan.

**Tabel 1. Perkembangan Harga BBM tahun 2004 – 2005**

Jenis BBM	Harga Lama	Harga Baru	%
Minyak Tanah Rumah Tangga	Rp 700	700	0%
Minyak Tanah Industri	Rp 1.800	2.200	22%
Premium	Rp 1.810	2.400	32%
Minyak Solar Transportasi	Rp 1.650	2.100	27%
Minyak Solar Industri	Rp 1.650	2.200	33%
Minyak Diesel	Rp 1.650	2.300	39%
Minyak Bakar	Rp 1.560	2.300	47,44%

Sumber : Pemerintah, Kompas. 2005

Beberapa alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, diantaranya adalah :

1. Perbedaan harga jual domestik dengan harga luar negeri yang sangat timpang akibat peningkatan harga minyak bumi yang dewasa ini telah mencapai US\$ 50 per barrel, jauh diatas harga minyak dalam APBN 2005 sebesar US\$ 24 per barrel.
2. Perbedaan harga ini kemudian menimbulkan pembengkakan subsidi.
3. Alasan lain yang menjadi dasar adalah menyangkut masalah keadilan. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah keatas.
4. memungkinkan pemerintah Penyesuaian harga BBM ini dengan persetujuan DPR mengolaksikan lebih banyak untuk program penanggulangan kemiskinan, pembangunan pedesaan dan pengurangan beban keluarga miskin (LPEM FEUI, 22 Maret 2005).

Pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM sesuai dengan Peraturan Presiden No. 22 tahun 2005 setelah melewati pertimbangan yang seksama. Kenaikan harga BBM diluar negeri menyebabkan membengkaknya subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah yaitu sebesar 73 triliun pada tahun anggaran 2005 dan keadaan ini sangat memberatkan keuangan negara (Kompas, 1 maret 2005).

Sesuai dengan APBN tahun 2005 dimana subsidi BBM itu dicabut tetapi pencabutan subsidi itu bukan sekedar penghilangan tetapi digunakan untuk kompensasi masyarakat miskin.

Beban utang luar negeri yang sangat memberatkan keuangan negara telah memperkecil kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi. Subsidi BBM dinilai pemerintah membebani

APBN. Dengan mencabut subsidi pemerintah mengharapkan setidaknya dapat memperoleh tambahan dana dari BBM sekitar 20 triliun rupiah. Dana subsidi tadi di kompensasikan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam bentuk beasiswa, kesehatan, penguatan ekonomi lapisan bawah, pembagian raskin dan sebagian lagi untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan dalam kerangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Dampak dari kenaikan harga BBM ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Naiknya harga BBM memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebab, distribusi bahan kebutuhan pokok mengikuti kenaikan ongkos transportasi yang tentunya juga naik mengikuti kenaikan harga BBM. Menurut menteri kelautan dan perikanan Rokhmin Dahuri, kenaikan harga BBM ini sangat luar biasa bagi masyarakat kecil, khususnya nelayan. Dimana nelayan sangat menggantungkan pada pasokan dan stabilitas harga, ternyata komponen biaya BBM berkisar antara 30 - 40% dari seluruh biaya operasi penangkapan ikan per tripnya.

Gejala kemiskinan nelayan di kota Bengkulu hampir sama dengan keadaan nelayan lain di Indonesia yaitu sangat memprihatinkan. Kota Bengkulu terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 67 kelurahan. Sedangkan penyebaran nelayan di kota Bengkulu hanya terdapat di 5 kecamatan yang tersebar pada 11 kelurahan di kota Bengkulu.

Masyarakat nelayan di kota Bengkulu merupakan masyarakat majemuk. Selain nelayan asli Bengkulu, masyarakat nelayan di kota Bengkulu juga dibentuk dari masyarakat pendatang yang datang dari berbagai daerah. Mereka bekerja atau pergi melaut setiap hari. Hasil tangkapan nelayan ini sangat tergantung pada kondisi alam/iklim. Disamping dikarenakan iklim yang tidak bersahabat bagi nelayan (karena Bengkulu berhadapan langsung dengan Samudra Hindia), kenaikan harga BBM juga sangat memberatkan masyarakat nelayan di kota Bengkulu.

Untuk membantu meringankan beban nelayan akibat naiknya harga BBM ini, pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk subsidi kepada nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu. Bantuan subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan Bengkulu adalah dalam bentuk bantuan dana PEM (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), pembangunan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan), yaitu stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan dan pembinaan teknis dan menyeluruh yang mengarah kepada peningkatan pendapatan nelayan.

Bantuan subsidi yang telah diberikan kepada nelayan di kota Bengkulu ini, ternyata belum menyentuh kebutuhan yang paling mendesak bagi nelayan sehingga belum mampu mengangkat kehidupan nelayan menjadi lebih baik. Dalam kerangka jangka pendek subsidi tersebut dapat membantu. Untuk itu perlu diketahui kebutuhan nelayan yang paling mendesak sehingga bantuan subsidi yang diberikan pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan kota Bengkulu ini benar-benar menyentuh keinginan masyarakat nelayan di kota Bengkulu sehingga dalam jangka panjang dapat mengangkat kehidupan nelayan menjadi lebih baik. Untuk itu perlu diambil kebijakan yang tepat agar pemberian subsidi tersebut tepat sasaran.

Berdasarkan uraian diatas, dipandang perlu untuk mengkaji tentang "Analisis kebijakan subsidi bagi nelayan akibat kenaikan harga BBM."

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan utama dalam studi ini adalah : "Menentukan bantuan subsidi apakah yang paling tepat bagi nelayan di kota Bengkulu akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak."

## **3. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bantuan subsidi apa yang paling tepat bagi nelayan di kota Bengkulu akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak.

## **4. LANDASAN TEORI**

### **Pengertian kemiskinan**



Dalam memaparkan profil kemiskinan, rumah tangga dan juga anggota rumah tangga dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok rumah tangga miskin dan tidak miskin. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang konsumsinya tidak mencukupi kebutuhan akan makanan, minuman dan non makanan yang nilainya diwakili oleh suatu garis kemiskinan. Rumah tangga tidak miskin adalah yang konsumsi perkepalanya diatas garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang digunakan dalam tulisan ini adalah garis kemiskinan menurut BPS.

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti makanan, minuman, rumah, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, akses terhadap informasi, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu tercakup juga pengertian keadaan kekurangan modal, baik dalam bentuk uang tunai, barang maupun pengetahuan yang merupakan potensi, baik bagi individu maupun rumah tangga, untuk memenuhi sejumlah kebutuhannya. (Basri, 1997 : 178-198).

Sharp, et al. (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu :

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan/ *Vicious Circle of Poverty* (Kuncoro, 2004 : 157).

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Menurut Ginandjar Kartasasmita, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh empat penyebab berikut :

1. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.
2. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
3. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan.
4. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya (Kartasasmita, 1996 : 234 - 239).

### **Pengertian Nelayan**

Pengertian nelayan sebagaimana yang dikemukakan oleh Poerwadarminta (1982 : 68) adalah penangkap ikan dimana menangkap ikan dilaut tidak hanya sekedar mengisi waktu saja tetapi secara terus menerus atau sebagian besar waktunya dipergunakan untuk menangkap ikan.

Jika ditinjau dari keadaan/status, nelayan dapat dibedakan atas dua pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh Dirjen Perikanan yaitu :

1. Nelayan Tetap yaitu orang yang melakukan penangkapan ikan di laut dimana sebagian besar waktunya dipergunakan untuk mencari ikan atau dengan kata lain orang tersebut pekerjaan tetapnya adalah menangkap ikan dilaut.
2. Nelayan Sambilan yaitu orang yang melakukan penangkapan ikan di laut tetapi tidak secara terus menerus (Dinas Perikanan, 1988 : 14).

Manurung (1984) dalam Mulyani , memberikan kriteria nelayan kecil /miskin sebagai berikut :

1. Pendapatan perkapita berada dibawah garis kemiskinan.
2. Nelayan pemilik unit usaha kecil (anak buah perahu motor/nelayan sama atau lebih tiga orang) dan aktif kelaut sebagai nelayan penuh.
3. Nelayan yang tidak memiliki alat produksi (perahu dan alat penangkapannya), nelayan ini disebut pandega.
4. Nelayan dengan tenaga kerja dalam keluarga yang berlebihan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga baik di dalam maupun diluar sektor perikanan.
5. Pemilikan modal yang relatif kecil sehingga untuk memiliki unit usaha penangkapan yang lebih baik sangat terbatas.
6. Pendidikan, keterampilan dan inovasi nelayan dan anggota keluarganya relatif rendah.

### **Pengertian Pendapatan**

Pengertian pendapatan rumah tangga menurut BPS adalah seluruh penerimaan dan keuntungan yang di dapat oleh setiap rumah tangga atas balas jasa dari faktor produksi (BPS, 1992).

Menurut Kadariah (1981 : 25) menyatakan bahwa pendapatan adalah penerimaan dari gaji, upah maupun keuntungan yang diperoleh dalam jangka waktu seminggu, sebulan, ataupun setahun.

Sedangkan menurut Sukirno (2001 : 49-51) pendapatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Pendapatan pribadi adalah semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apa pun, yang diterima oleh penduduk suatu negara.
2. Pendapatan disposebel adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka ingini.

Pendapatan merupakan masalah pokok dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, karena segala kegiatan rumah tangga baik dalam pemenuhan maupun dalam pemuasan kebutuhan hidupnya tergantung dari tingkat pendapatannya. Besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga tergantung dari besarnya pendapatan yang diperoleh rumah tangga tersebut.

Sedangkan pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pendapatan berupa uang rupiah yang dihasilkan oleh nelayan dari hasil penjualan ikan yang diperoleh dari hasil penangkapan ikan selama satu bulan.

### **Pengertian Pengeluaran**

Pengeluaran diartikan banyaknya penggunaan uang, barang atau jasa, baik untuk keperluan konsumsi makanan maupun non makanan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari selama satu bulan (BPS, 2002).

Secara umum data konsumsi Susenas (BPS, 1996) di bagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan/permintaan terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Pada kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk mengkonsumsi makanan. Menurut Lipsey, Steiner, D. Purvis (1991 : 33) pengeluaran adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dan dijual kepada rumah tangga selama 1 th (kecuali pengeluaran untuk perumahan, tempat tinggal yang digolongkan sebagai investasi).

### **Kebijakan Subsidi BBM**

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen/dapat pula pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. Artinya dalam mengkonsumsi suatu barang konsumen hanya diwajibkan untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah agar jangan sampai merugikan si produsen barang tersebut. (Suparmoko, 1992 : 36).

Kebijakan subsidi diberlakukan ketika harga produk suatu energi dinilai tidak seimbang/sebanding dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam praktek, subsidi dapat

dibedakan antara subsidi secara finansial atau secara ekonomi. Secara finansial subsidi hanya merupakan selisih antara biaya produksi dan biaya distribusi dengan harga produk energi tersebut yang sebenarnya di pasar. Sedangkan subsidi secara ekonomi merupakan perbedaan antara harga sebenarnya terjadi dari proses produksi dengan harga efisien. Jika selisihnya tidak dijadikan subsidi dalam subsidi secara ekonomi, seluruh selisih tersebut akan ditanggung oleh masyarakat dan perekonomian. Dalam kebijakan harga, subsidi merupakan salah satu instrumen untuk meratakan penggunaan energi di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (Yusgiantoro, 2000 : 176).

## 5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat induktif yaitu menjelaskan dan menggambarkan setiap data yang diperoleh dan dipercaya kebenarannya dari hasil observasi di lapangan. Sehingga dapat dilihat kebijakan subsidi yang paling tepat bagi nelayan di kota Bengkulu.

Penelitian ini dilakukan pada nelayan tradisional. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu, dikatakan seseorang sebagai nelayan tradisional karna adanya karakteristik sendiri pada nelayan tersebut, yaitu dari jenis dan ukuran perahu/alat tangkap yang digunakan nelayan. Perahu yang digunakan oleh nelayan tradisional ukurannya lebih kecil dari perahu nelayan modern, kekuatan mesinnya rata-rata 5-16 Pk. Mayoritas nelayan tradisional di kota Bengkulu masih mengandalkan alat tangkap sederhana untuk beroperasi di perairan pesisir di bawah 6 mil. Jumlah jam kerja yang mereka gunakan adalah satu hari kerja ( $\pm 8$  jam kerja).

Untuk menentukan kebijakan apa yang paling tepat bagi nelayan digunakan metode pengambilan keputusan melalui AHP (Analytic Hierarchy Process).

Prinsip dasar AHP adalah untuk mengukur suatu persepsi seseorang maupun perasaan terhadap berbagai persoalan seperti ekonomi, social, lingkungan maupun politik dengan menggunakan skala yang luwes AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1980. Proses AHP ini menggunakan Pairwise Comparisons (perbandingan berpasangan). Pembuatan keputusan dimulai dengan menyusun kerangka hirarki dari keputusan. Hirarki ini mengungkapkan factor-faktor yang dipertimbangkan sebaik mungkin dari berbagai macam alternatif keputusan (Julianto, 2000 : 51-56).

Tahapan penggunaan metode ini adalah :

1. Pairwise Comparisons, yaitu membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP. Hasil dari penilaian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk matrik pairwise comparisons.
2. Compute the Evaluation, yaitu menghitung nilai dari matrik pairwise comparisons, dimulai dengan mengubah angka dalam bentuk desimal agar lebih mudah mengolahnya ke dalam komputer.
3. Determining the Consistency Ratio, yaitu menentukan rasio konsistensi
 
$$CR = \frac{CI}{RI}, \text{ dimana } CI = \frac{\alpha - n}{n - 1}$$
4. Menentukan rangking dari keseluruhan alternatif yang paling tepat.

## 6. KEBIJAKAN SUBSIDI BAGI NELAYAN

### Proses Penggunaan AHP

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam penggunaan metode AHP ini, yaitu menyusun hierarki, proses penentuan prioritas dan proses sintesa. Berdasarkan proses-proses tersebut di atas, maka hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

### Kriteria Utama

Dari hasil perhitungan pada matriks<sup>1</sup>, yaitu matriks pairwise comparison kriteria berdasar goal/tujuan, dapat diartikan bahwa peningkatan pendapatan merupakan kriteria terpenting karena prioritasnya tertinggi, yaitu 0,50. disusul kemudian pengurangan beban dengan prioritas sebesar 0,41 dan peningkatan kualitas SDM dengan prioritas sebesar 0.09.

Matriks 2, yaitu matriks pairwise comparison aktor penyalur berdasar kriteria peningkatan pendapatan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, aktor penyalur yang paling diinginkan nelayan adalah aparat kelurahan dengan prioritas 0,61 disusul kemudian kelompok nelayan dengan prioritas 0,29 dan dinas kelautan dan perikanan dengan prioritas 0,10.

Matriks 3, yaitu matriks pairwise comparison aktor penyalur berdasarkan kriteria peningkatan kualitas SDM, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, aktor penyalur yang paling diinginkan nelayan adalah dinas kelautan dan perikanan dengan prioritas 0,58 disusul kemudian aparat kelurahan dengan prioritas 0,27 dan kelompok nelayan dengan prioritas 0,15.

Matriks 4, yaitu matriks pairwise comparison aktor penyalur berdasarkan kriteria pengurangan beban, dapat diartikan bahwa berdasarkan ke tiga pilihan bersama, aktor penyalur yang paling diinginkan nelayan adalah dinas kelautan dan perikanan dengan prioritas 0,49 disusul kemudian aparat kelurahan dengan prioritas 0,37 dan kelompok nelayan dengan prioritas 0,14.

Matriks 5, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria peningkatan pendapatan dengan aktor penyalur Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ke tiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,58 disusul kemudian bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,27 dan bantuan modal/uang dengan prioritas 0,15.

Matriks 6, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria peningkatan pendapatan dengan aktor penyalur aparat kelurahan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah bantuan sarana /alat tangkap dengan prioritas 0,49 disusul kemudian bantuan modal/uang dengan prioritas 0,37 dan pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,14.

Matriks 7, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria peningkatan pendapatan dengan aktor penyalur kelompok nelayan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,49 disusul kemudian bantuan modal/uang dengan prioritas 0,37 dan pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,14.

Matriks 8, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria peningkatan kualitas SDM dengan aktor penyalur Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,64 disusul kemudian bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,24 dan bantuan modal/uang dengan prioritas 0,12.

Matriks 9, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria peningkatan kualitas SDM dengan aktor penyalur aparat kelurahan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,58 disusul kemudian bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,27 dan bantuan modal/uang dengan prioritas 0,15.

Matriks 10, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria peningkatan kualitas SDM dengan aktor penyalur kelompok nelayan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah bantuan modal/uang dengan prioritas 0,49 disusul kemudian bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,37 dan pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,14.

Matriks 11, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria pengurangan beban dengan aktor penyalur Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah bantuan modal/uang dengan prioritas 0,49 disusul kemudian bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,37 dan pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,14.

Matriks 12, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria pengurangan beban dengan aktor penyalur aparat kelurahan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah bantuan modal/uang dengan prioritas 0,52 disusul kemudian bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,37 dan pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,14.

Matriks 13, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria pengurangan beban dengan aktor penyalur kelompok nelayan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah bantuan

modal/uang dengan prioritas 0,49 disusul kemudian bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,37 dan pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,14.

### Consistency Ratio

Dari perhitungan consistency ratio yang berkisar antara 0,5-6,9%, bahwa nilai CR yang dipersyaratkan yaitu tidak boleh lebih dari 10%. ini berarti bahwa perhitungan yang dilakukan telah memenuhi syarat consistency dan perhitungan tidak perlu diulangi lagi atau direvisi.

### Aktor Penyalur

Matriks 14, yaitu matriks pairwise comparison kriteria berdasar aktor penyalur yang diinginkan oleh nelayan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, aktor penyalur yang paling diinginkan nelayan adalah aparat kelurahan dengan prioritas 0,53 disusul kemudian kelompok nelayan dengan prioritas 0,31 dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan prioritas 0,16.

### Alternatif Pilihan

Matriks 15, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria peningkatan pendapatan, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,45 disusul kemudian bantuan modal/uang dengan prioritas 0,34 dan pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,21.

Matriks 16, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria peningkatan kualitas SDM, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, alternatif pilihan yang paling diinginkan nelayan adalah pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,45 disusul kemudian bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,30 dan bantuan modal/uang dengan prioritas 0,25.

Matriks 17, yaitu matriks pairwise comparison alternatif pilihan berdasarkan kriteria pengurangan beban, dapat diartikan bahwa berdasarkan ketiga pilihan bersama, pilihan yang paling diinginkan oleh nelayan adalah bantuan modal/uang dengan prioritas 0,53 disusul kemudian bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,35 dan pelatihan kewirausahaan dengan prioritas 0,12.

Dengan mendasar pada hasil tabulasi data primer di atas, maka diperoleh gambaran yang dapat dipetik dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Untuk kriteria kebijakan subsidi yang tepat bagi nelayan tradisional di kota Bengkulu, berdasar kriteria hierarki yang diprioritaskan adalah peningkatan pendapatan dengan prioritas 0,50. Hal ini dikarenakan pendapatan merupakan faktor yang paling utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Minimnya pendapatan nelayan tradisional ini menyebabkan kurang tercukupinya kebutuhan akan gizi, sandang, tempat tinggal yang layak, kebutuhan pendidikan, dan kesehatan.
2. Dilihat dari sisi aktor penyalur, ternyata aktor yang paling berperan menyalurkan dana bantuan subsidi adalah aparat kelurahan dengan prioritas 0,53 dibanding dengan aktor lainnya. Hal ini dikarenakan aparat kelurahan merupakan lembaga yang lebih terstruktur dan lebih dikenal dan lebih mudah untuk didatangi oleh masyarakat nelayan dibanding aktor lainnya.
3. Untuk alternatif pilihan kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat nelayan adalah dalam bentuk bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,45. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang paling diinginkan oleh masyarakat nelayan guna meningkatkan pendapatannya adalah bentuk sarana/alat tangkap dibanding dengan alternatif lainnya.

## 7. KESIMPULAN

1. Hasil analisis kebijakan subsidi yang tepat bagi nelayan tradisional di kota Bengkulu, dari ketiga yang diajukan untuk nelayan, yaitu : peningkatan pendapatan, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas SDM dan pengurangan beban, kriteria kebijakan subsidi yang paling tepat adalah peningkatan pendapatan dengan prioritas 0,50 dan alternatif pilihan yang diinginkan nelayan adalah bantuan sarana/alat tangkap dengan prioritas 0,45.
2. Untuk mendukung perkembangan sektor kelautan dan perikanan, perlu pengembangan sarana dan prasarana. Masih minimnya sarana yang dimiliki oleh nelayan tradisional

menyebabkan para nelayan sulit untuk memanfaatkan potensi ikan yang cukup banyak di laut bengkulu, sehingga hasil yang didapatkan sangat minim.

## DAFTAR PUSTAKA

**Basri, Faisal H. 1997.** *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI : Distorsi, Peluang dan Kendala.* Jakarta : Erlangga.

Biro Pusat Statistik. 1992. *Indikator Kesejahteraan Sosial.* Jakarta : BPS.

Biro Pusat Statistik. 1996. *Susenas : Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Propinsi.* Jakarta : BPS.

Dinas Perikanan dan Kelautan kota Bengkulu. 2004.

Hadi, Sutrisno. 1982. *Metode Reserch II.* Jakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Julianto. 2000, Juli - September. Metode Analitic Hierarchy Process (AHP). *Interest : Majalah Ilmiah FE-UNIB.* Vol. IV (03), 51-56.

Kadariah. 1981. *Analisa Pendapatan Nasional.* Jakarta : Bina Aksara.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta : CIDESINDO.

Kompas. 2005, 01 Maret. *Harga BBM akhirnya naik.* Hal. 1 dan 11.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Strategi dan Peluang.* Jakarta : Erlangga.

**Lipsey, G. Richard, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis. 1991.** *Pengantar Makro Ekonomi (terjemahan).* Jakarta : Erlangga.

Mulyani. 2002. *Analisis Perbedaan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan dan Rumah Tangga Non Nelayan di Kelurahan Pasar Bengkulu.* Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi. UNIB.

Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka.

Sukirno, Sadono. 2001. *Pengantar Teori Makroekonomi.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suparmoko. 1992. *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta : BPFE.

Winardi. 1989. *Kamus Ekonomi.* Bandung : Mandar Maju.

[www.djgsm.esdm.go.id](http://www.djgsm.esdm.go.id). 2004, 26 Juli. *Apresiasi Terhadap Penyelenggaraan SPDN/SPBN.*

[www.energi\\_lipi.go.id](http://www.energi_lipi.go.id). 2004, 25 September. *Revolusi Energi atau Mati.*

[www.indomedia.com](http://www.indomedia.com). 2005, 17 Maret. *[proletar] Naiknya Harga BBM : Di Mana Bukti Keadilan ?.*

[www.kompas.com](http://www.kompas.com). 2003, 19 Januari. *Perluakah Rakyat di Subsidi.*

[www.lpem.org/news](http://www.lpem.org/news). 2005, 22 Maret. *[mm-ugm] Just Sharing Info*.

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). 2005, 02 Maret. *Kenaikan BBM dan Gejolak Ekonomi-Politik*.

Yusgiantoro, Purnomo. 2000. *Ekonomi Energi : Teori dan Praktik*. Jakarta : LP3ES.